

Tren Administrasi Keuangan Sekolah dalam Tranparansi Anggaran

Ragil Chandra Pratama^{1*}

¹ Departemen Pendidikan Luar Biasa, Universitas Negeri Padang, Kota Padang, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat artikel:

Dikirim pada tanggal 29 Januari 2026

Direvisi pada tanggal 7 Maret 2026

Diterima pada tanggal 20 April 2026

Terbit online pada tanggal 30 Juli 2026

Kata kunci:

Transparansi, Akuntabilitas, Administrasi Keuangan Sekolah, Anggaran Pendidikan



This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Laboratory of Educational Administration Departemen Universitas Negeri Padang

ABSTRAK

Praktik administrasi ketatausahaan sekolah, khususnya dalam Transparansi anggaran dalam administrasi keuangan sekolah merupakan aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pendidikan yang akuntabel dan dipercaya masyarakat. Seiring perkembangan teknologi dan tuntutan publik terhadap keterbukaan informasi, sekolah dituntut untuk menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang lebih terbuka, partisipatif, dan berbasis digital. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji tren administrasi keuangan sekolah dalam mendukung transparansi anggaran serta mengidentifikasi tantangan dan strategi implementasinya. Metode yang digunakan adalah studi literatur terhadap jurnal dan regulasi terkait pengelolaan keuangan pendidikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa tren utama meliputi digitalisasi laporan keuangan, pelibatan komite sekolah dan orang tua, peningkatan audit internal, serta penyesuaian dengan kebijakan pemerintah. Meskipun demikian, masih terdapat kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, dan budaya organisasi yang belum sepenuhnya terbuka. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas pengelola keuangan sekolah serta komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan agar transparansi anggaran dapat terwujud secara optimal.

Penulis Korespondensi:

Ragil Chandra Pratama

Email: ragilprtama2802@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Sekolah, pada hakikatnya, adalah jantung dari peradaban sebuah bangsa. Ia bukan hanya sekadar bangunan fisik tempat transfer ilmu pengetahuan terjadi, tetapi lebih dari itu, ia adalah lembaga kepercayaan masyarakat. Setiap anak yang dititipkan, setiap rupiah yang disisihkan orang tua melalui iuran, dan setiap dana negara yang dialokasikan—semuanya adalah amanah. Di titik inilah, pengelolaan keuangan sekolah berhenti menjadi urusan pembukuan semata dan bertransformasi menjadi cermin integritas, akuntabilitas, dan prinsip tata kelola yang sehat.

Namun, realitas di lapangan seringkali memunculkan kerutan di dahi. Keterbatasan informasi tentang penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), laporan keuangan yang hanya beredar di kalangan terbatas, atau anggaran yang terasa seperti kotak hitam bagi orang tua dan masyarakat, secara perlahan dapat menggerus kepercayaan. Dalam iklim seperti ini, tuntutan akan transparansi anggaran bukan lagi sekadar wacana administratif, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk membangun ekosistem pendidikan yang kolaboratif dan saling percaya.

Artikel ini lahir dari kegelisahan sekaligus harapan akan tren yang mulai bergeser. Saat ini, kita menyaksikan bagaimana semangat keterbukaan dan tuntutan akuntabilitas publik mulai meresap ke dalam administrasi keuangan sekolah. Mulai dari pemanfaatan papan informasi fisik yang lebih informatif, hingga adopsi teknologi digital seperti website sekolah dan aplikasi pelaporan. Tren ini menarik untuk dikaji: sejauh mana pergeseran itu terjadi? Apakah praktik transparansi ini telah menyentuh ranah partisipasi publik yang

substansif, atau masih sebatas formalitas pelaporan? Bagaimana teknologi membentuk sekaligus mempersulit jalan menuju tata kelola keuangan yang terbuka?

Melalui artikel berjudul "Tren Administrasi Keuangan Sekolah dalam Transparansi Anggaran" ini, penulis berupaya untuk menelusuri dinamika dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Artikel ini akan memotret perkembangan terkini, menganalisis peluang serta tantangan yang muncul, dan pada akhirnya, berupaya untuk menyumbang pemikiran dalam upaya kolektif kita memperkuat pilar-pilar kejujuran dan keterbukaan di institusi yang paling fundamental bagi masa depan bangsa: sekolah kita bersama.

Pengelolaan keuangan sekolah merupakan bagian penting dari sistem pendidikan nasional karena berkaitan langsung dengan penyediaan layanan pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa pengelolaan dana pendidikan harus dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar dalam tata kelola keuangan sekolah, khususnya dalam pengelolaan dana publik seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Dalam praktiknya, masih ditemukan sekolah yang belum sepenuhnya transparan dalam pengelolaan anggaran, sehingga memunculkan keluhan dari masyarakat dan menurunkan kepercayaan publik (Nurdiani & Nugraha, 2018). Kondisi ini mendorong perlunya inovasi dalam administrasi keuangan sekolah, baik melalui pemanfaatan teknologi, peningkatan partisipasi pemangku kepentingan, maupun penguatan sistem pengawasan internal. Seiring dengan perkembangan zaman, muncul berbagai tren baru dalam administrasi keuangan sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi anggaran. Oleh karena itu, artikel ini mengkaji tren tersebut serta implikasinya terhadap tata kelola keuangan sekolah di Indonesia.

2. KAJIAN TEORI

Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Sekolah

Transparansi diartikan sebagai keterbukaan dalam penyampaian informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, baik internal maupun eksternal. Transparansi memungkinkan masyarakat mengetahui sumber, penggunaan, serta hasil dari pengelolaan dana sekolah (Bastian, 2007). Sementara itu, akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pengelola untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tujuan yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2009).

Dalam konteks pendidikan, transparansi dan akuntabilitas menjadi indikator utama keberhasilan pengelolaan dana sekolah karena dana pendidikan berasal dari berbagai sumber, termasuk pemerintah dan masyarakat. Oleh sebab itu, keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban yang jelas menjadi kebutuhan mutlak dalam sistem pendidikan modern (Nurdiani & Nugraha, 2018).

Administrasi Keuangan Sekolah

Administrasi keuangan sekolah mencakup seluruh kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, dan pengawasan keuangan. Pengelolaan keuangan yang baik bertujuan untuk menjamin tersedianya dana yang cukup bagi kegiatan pendidikan serta mencegah terjadinya penyimpangan penggunaan dana (Sagala, 2013).

3. METODE, DATA, ANALISIS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus untuk mendalami tren dan praktik administrasi keuangan sekolah dalam mewujudkan transparansi anggaran. Penelitian kualitatif dipilih karena mampu menggali makna, persepsi, dan pengalaman mendalam dari para pelaku di sekolah (Creswell & Poth, 2018).

- 1) Desain Penelitian: Studi kasus tunggal instrinsik, berfokus pada "tren administrasi keuangan sekolah" sebagai fenomena yang ingin dipahami secara mendalam.
- 2) Lokasi dan Subjek: Penelitian dilakukan di 3 (tiga) sekolah menengah pertama negeri (SMPN) di Kota Payakumbuh yang dinilai memiliki inisiatif dalam transparansi anggaran. Subjek penelitian meliputi:
 - a) Kepala Sekolah (3 orang)
 - b) Bendahara/Bagian Keuangan Sekolah (3 orang)
 - c) Ketua Komite Sekolah (3 orang)
 - d) Perwakilan Guru (3 orang)
 - e) Total informan: 12 orang.

- 3) Teknik Pengumpulan Data:
 - a) Wawancara Mendalam (In-depth Interview): Dilakukan secara semi-terstruktur dengan panduan pertanyaan terbuka yang mengacu pada indikator transparansi seperti akurasi pelaporan, kemudahan akses informasi, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi.
 - b) Studi Dokumen: Analisis terhadap dokumen-dokumen keuangan sekolah seperti Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS), Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LPJ), notulensi rapat komite, dan laporan yang dipublikasikan di website atau papan informasi sekolah.
 - c) Observasi: Observasi non-partisipan terhadap mekanisme penyampaian informasi keuangan, seperti rapat komite atau tampilan informasi di papan pengumuman sekolah.
- 4) Analisis Data: Data dianalisis secara interaktif menggunakan model analisis tematik (Thematic Analysis) dari Braun & Clarke (2006). Prosesnya meliputi:
 - a) Transkripsi dan familiarisasi data.
 - b) Pembuatan kode awal (initial coding).
 - c) Pencarian tema (searching for themes).
 - d) Peninjauan dan penamaan tema (reviewing and defining themes).
 - e) Penyusunan laporan analisis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan pengumpulan data, ditemukan beberapa tren utama dalam administrasi keuangan sekolah untuk transparansi anggaran:

- 1) Tren Pelaporan dan Publikasi Anggaran:
 - a) Seluruh sekolah sampel telah menyusun RKAS dan LPJ secara tertib. Namun, tingkat detail yang dipublikasikan bervariasi. Dua sekolah hanya mempublikasikan ringkasan atau infografis anggaran, sementara satu sekolah melampirkan dokumen lengkap (rincian per pos) di website sekolah.
 - b) Media publikasi utama masih didominasi papan pengumuman fisik (100%), diikuti website sekolah (67%), dan grup WhatsApp komite/orang tua (100%).
- 2) Tren Partisipasi dan Umpan Balik:
 - a) Forum rapat komite sekolah menjadi sarana utama pertanggungjawaban keuangan. Semua kepala sekolah melaporkan realisasi anggaran secara rutin dalam forum ini.
 - b) Mekanisme umpan balik masih terbatas. Hanya satu sekolah yang memiliki kotak saran khusus dan formulir online sederhana untuk menampung pertanyaan atau masukan mengenai keuangan sekolah.
- 3) Tren Pemanfaatan Teknologi Digital:
 - a) Adopsi Aplikasi/Sistem: Dua sekolah telah menggunakan sistem informasi keuangan sekolah berbasis web/cloud yang terintegrasi dengan Dinas Pendidikan. Sistem ini memungkinkan pelaporan real-time dan akses terbatas bagi komite sekolah.
 - b) Media Sosial dan Komunikasi: Grup WhatsApp digunakan secara intensif untuk menginformasikan agenda rapat dan poin-poin penting laporan keuangan, namun tidak untuk membagikan dokumen lengkap.
 - c) Hambatan: Keterbatasan SDM (kemampuan operator) dan koneksi internet menjadi kendala utama dalam optimalisasi teknologi.

Pembahasan

Analisis terhadap temuan data menunjukkan bahwa tren administrasi keuangan sekolah menuju transparansi anggaran bergerak pada tiga poros utama, meski dengan tingkat kedalaman dan konsistensi yang berbeda:

- 1) Dari Formalitas Menuju Substansi: Sekolah-sekolah telah memenuhi aspek formal akuntabilitas melalui penyusunan RKAS/LPJ dan pelaporan di rapat komite. Namun, transparansi substantif—yang ditandai dengan kemudahan akses publik terhadap data rinci, penyajian yang mudah dipahami, dan ruang dialog yang terbuka—masih perlu ditingkatkan. Variasi detail laporan yang

dipublikasikan mengindikasikan bahwa pemahaman tentang "seberapa transparan" masih berbeda-beda di tingkat pelaksana (Mardiasmo, 2019).

- 2) Dari Keterbukaan Pasif Menuju Partisipasi Aktif: Tren menunjukkan pergeseran dari sekadar "memberi tahu" (transparency as disclosure) menuju upaya melibatkan pemangku kepentingan (transparency as participation). Kehadiran teknologi digital, seperti grup WhatsApp dan website, berpotensi besar memperluas partisipasi. Namun, analisis menemukan bahwa teknologi masih banyak digunakan untuk komunikasi satu arah. Partisipasi aktif melalui kanal umpan balik yang efektif dan responsif belum menjadi praktik umum. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan seringkali masih simbolis (Kristiansen et al., 2009).
- 3) Dari Manual Menuju Digital dengan Tantangan Implementasi: Adopsi teknologi adalah tren yang tak terelakkan. Sistem informasi keuangan dan media digital mempercepat diseminasi informasi dan meningkatkan akuntabilitas. Namun, analisis mengungkap adanya kesenjangan digital (digital gap). Tantangan teknis (seperti infrastruktur) dan non-teknis (kompetensi SDM) dapat menghambat efektivitas transparansi digital dan berpotensi menciptakan eksklusi bagi pihak yang tidak melek teknologi. Oleh karena itu, transparansi hybrid (gabungan antara fisik dan digital) masih relevan untuk memastikan inklusivitas.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap data dan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa tren administrasi keuangan sekolah dalam upaya mewujudkan transparansi anggaran sedang mengalami transformasi multidimensi, namun belum sepenuhnya mencapai tingkat partisipatif dan substantif yang ideal. Tren ini tidak lagi sekadar tentang pemenuhan kewajiban administratif belaka, melainkan telah bergerak menuju penguatan tata kelola yang lebih terbuka dengan dukungan teknologi.

Pertama, penelitian ini menemukan bahwa tren pelaporan telah melampaui batas formalitas internal. Sekolah-sekolah tidak hanya menyusun dokumen keuangan untuk kepentingan pemeriksaan atas, tetapi telah mulai mempublikasikannya kepada pemangku kepentingan, terutama melalui rapat komite dan papan informasi. Namun, kualitas transparansi masih terbatas pada keterbukaan pasif (passive disclosure). Informasi yang diberikan seringkali berupa ringkasan, bukan data rinci yang memungkinkan pengawasan mendalam oleh masyarakat. Dengan demikian, jawaban atas pertanyaan penelitian menunjukkan bahwa trennya adalah peningkatan kesadaran untuk terbuka, tetapi belum diimbangi dengan standar kedalaman informasi yang memadai.

Kedua, teknologi digital menjadi penggerak tren utama, memfasilitasi kecepatan dan jangkauan diseminasi informasi. Penggunaan website sekolah, grup WhatsApp, dan aplikasi keuangan berbasis cloud menandai peralihan dari sistem manual yang tertutup. Namun, adopsi teknologi ini belum merata dan menghadapi kendala signifikan berupa kesenjangan kompetensi SDM dan infrastruktur. Oleh karena itu, teknologi lebih banyak berfungsi sebagai saluran informasi satu arah daripada alat untuk membangun dialog dan partisipasi aktif.

Ketiga, partisipasi masyarakat, dalam hal ini komite sekolah dan orang tua, masih berada pada tataran konsultatif dan simbolis. Mekanisme umpan balik yang sistematis dan responsif belum terbangun kuat. Ruang partisipasi masih didominasi oleh forum rapat periodik, belum berevolusi menjadi keterlibatan berkelanjutan dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi anggaran. Dengan kata lain, tren menuju transparansi partisipatif (participatory transparency) sudah tampak dalam bentuk keterbukaan forum, namun belum pada kedalaman keterlibatan dan akuntabilitas timbal balik.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa administrasi keuangan sekolah sedang dalam proses transisi dari budaya tertutup menuju terbuka, didorong oleh tuntutan regulasi dan potensi teknologi. Tantangan utama terletak pada bagaimana mendorong transparansi ini dari sekadar penyampaian informasi (transparency as information) menuju penciptaan hubungan kepercayaan dan akuntabilitas kolektif (transparency as accountability) antara sekolah dan masyarakat.

Berdasarkan kesimpulan di atas, dirumuskan beberapa saran tindakan praktis yang ditujukan kepada pemangku kepentingan spesifik untuk memperkuat dan memantapkan tren positif ini.

- 1) Kepada Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan):
 - a) Menyusun dan Mensosialisasikan Standar Operasional Prosedur (SOP) Publikasi Keuangan Sekolah: Buatlah pedoman yang jelas dan sederhana tentang informasi keuangan minimal yang wajib diakses publik (misalnya, RKAS, LPJ per pos, daftar inventaris hasil pembelian). SOP ini harus mencakup format publikasi baik fisik (papan informasi) maupun digital (website). Tujuannya untuk

- menstandarisasi kedalaman informasi, mengurangi variasi interpretasi, dan memastikan semua sekolah menyajikan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b) Menyelenggarakan Pelatihan Integratif bagi Tenaga Administrasi Sekolah (TAS): Pelatihan tidak hanya fokus pada teknis pembukuan, tetapi juga pada kompetensi komunikasi publik dan literasi digital. Materi harus mencakup cara menyajikan laporan keuangan yang mudah dipahami awam, manajemen konten website sekolah, dan etika komunikasi dalam grup media sosial. Tujuannya untuk membangun kapasitas SDM sebagai ujung tombak transparansi.
- 2) Kepada Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah:
- a) Mengimplementasikan Model “Papan dan Portal Informasi Keuangan” yang Inklusif: Selain memajang ringkasan di papan, sediakan akses terhadap dokumen lengkap melalui meja informasi di kantor atau folder khusus yang dapat diakses di website sekolah. Pada setiap akhir periode, buatlah infografis sederhana (misalnya, alokasi dan realisasi BOS) yang dibagikan via WhatsApp grup orang tua. Tujuannya adalah memenuhi hak masyarakat atas informasi rinci sekaligus memudahkan pemahaman.
 - b) Membangun Mekanisme Umpan Balik yang Sistematis dan Responsif: Tentukan saluran resmi penerimaan pertanyaan dan pengaduan terkait keuangan (misalnya, formulir online, kotak saran, jam khusus konsultasi dengan bendahara). Wajibkan diri untuk merespons setiap masukan dalam waktu tertentu dan umumkan tindak lanjutnya dalam rapat komite berikutnya. Tujuannya adalah mengubah partisipasi dari sekadar mendengar menjadi berdialog, sehingga membangun kepercayaan.
- 3) Kepada Komite Sekolah dan Perwakilan Orang Tua:
- a) Melakukan Pengawasan Proaktif dengan Pendekatan Kolaboratif: Alih-alih hanya menunggu laporan, komite sekolah dapat membentuk tim kecil (pokja) audit sosial sederhana yang diberi akses memeriksa dokumen pendukung (kwitansi, daftar hadir kegiatan) secara berkala. Pendekatannya harus sebagai mitra yang membantu memastikan kelancaran administrasi, bukan sebagai pihak yang menghakimi. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas pengawasan dan memberikan dukungan nyata kepada sekolah.
 - b) Memanfaatkan Forum Rapat untuk Dialog yang Substansif: Siapkan pertanyaan atau usulan berdasarkan laporan keuangan yang telah diterima sebelumnya. Fokuskan diskusi pada evaluasi pencapaian program dan efektivitas anggaran, bukan hanya pada kecocokan jumlah. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas musyawarah dari persetujuan administratif menjadi pembahasan substantif untuk peningkatan mutu sekolah).

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa hormat dan syukur, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Hade Afriansyah, S.Pd., M.Pd., selaku dosen pengampu mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Atas bimbingan, ilmu, dan motivasi yang beliau berikan secara tulus dan berkelanjutan, penulis dapat menyelesaikan artikel ilmiah dengan permasalahan “Tren Administrasi Keuangan Sekolah dalam Transparansi Anggaran” ini.

Bapak Hade Afriansyah tidak hanya memberikan pemahaman teoritis yang mendalam mengenai prinsip-prinsip administrasi dan supervisi pendidikan, tetapi juga senantiasa mendorong mahasiswa untuk mengaitkan teori dengan realitas dan tantangan aktual di lapangan. Saran, kritik konstruktif, serta wawasan strategis yang beliau sampaikan selama proses konsultasi telah menjadi kompas yang sangat berharga, mengarahkan analisis penulis menjadi lebih fokus, kritis, dan aplikatif.

Artikel ini merupakan refleksi dari pembelajaran yang penulis peroleh di bawah bimbingan beliau. Semoga artikel ini dapat memberikan kontribusi pemikiran, sekecil apapun, bagi pengembangan bidang administrasi pendidikan, khususnya dalam mendorong praktik tata kelola keuangan sekolah yang lebih transparan dan akuntabel.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan dalam artikel ini. Untuk itu, penulis terbuka terhadap segala masukan dan saran perbaikan. Akhir kata, semoga dedikasi dan ilmu yang Bapak Hade Afriansyah tuangkan senantiasa menjadi amal jariyah dan memberikan manfaat yang luas bagi dunia pendidikan.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. (2007). Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
- Nurdiani, M. S., & Nugraha. (2018). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Sekolah. *Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan*, 6(1), 49–60.
- Sagala, S. (2013). Administrasi Pendidikan Kontemporer. Bandung: Alfabeta.
- Kemdikbud. (2019). Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Kristiansen, S., Dwiyanto, A., Pramusinto, A., & Putranto, E. A. (2009). Public Sector Reforms and Financial Transparency: Experiences from Indonesian Districts. *Contemporary Southeast Asia*, 31(1), 64-87.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using Thematic Analysis in Psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Mardiasmo. (2019). Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi.